

AGAMA, ETIKA DAN SISTEM EKONOMI

Oleh: Drs. Dahrur Sajadi, MA

dahrungsajadi@gmail.com

A. Abstrak

Para pemikir ilmu sosial beranggapan bahwa kode etika universal yang mendasari ekonomi modern adalah utilitarianisme, khususnya ajaran dari Jeremy Bentham.² Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan adalah, melakukan islamisasi, baik pada ilmu dan sistem ekonominya. Tapi, pendapat Jeremy Bentham tidaklah sepenuhnya benar. Tatkala menggagas sistem ekonomi Islam, al-Nabhani menyatakan tentang perlunya membedakan antara ilmu ekonomi -- yang sebagian besarnya adalah bebas nilai, dengan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi membahas hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan produksi, kualitas, dan kinerja. Kebanyakan ilmu-ilmu semacam ini bebas nilai dan bersifat universal. Contohnya, ilmu akuntansi, ia adalah ilmu yang bebas nilai dan tidak terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu. Sedangkan sistem ekonomi sudah melibatkan tata nilai tertentu, misalnya; ideologi, pandangan hidup, norma dan etika. Hal-hal yang berhubungan dengan sistem distribusi barang dan jasa merupakan bagian dari sistem ekonomi. Islam melarang menimbun barang, dan beredarnya riba di tengah-tengah aktivitas ekonomi. Pandangan semacam ini berbeda dengan pandangan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Karena itu, islamisasi ilmu, harus diarahkan pula kepada reformasi sistem ekonomi yang tidak bebas nilai, diganti dengan sistem dan nilai-nilai yang Islami.

Keyword. etika, sistem ekonomi, agama

B. Hubungan antara Agama, Etika dan Sistem Ekonomi

Pakar ekonomi Jerman dari Universitas Bochum --seorang yang dinilai berhasil dalam memakai metode verstehennya Weber dalam upaya memahami gagasan Islam tentang ekonomi dalam suatu seminar di Universitasnya -- mengemukakan adanya empat pendekatan yang dianut oleh pakar muslim dalam mengembangkan ekonomi Islam.

1. Pendekatan Pragmatis, yakni dengan melakukan kegiatan konkret dan langsung untuk menumbuhkan perekonomian dalam masyarakat muslim di seluruh dunia terutama dengan membentuk sistem kelembagaan yang dapat berfungsi mengembangkan perekonomian, sesuai dengan Islam.

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah dan Mahasiswa S3 UIA, Jakarta.

² Tentang paham utilitarianisme Bentham; baca Mark A. Lutz & Kenneth Lux; *The Change of Humanistic Economics*; California: The Benjamin Cummings Publishing Co.Inc, Menlo Park, 1979, h.32-33. Paham Bentham ini sampai pada perumusan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, antara lain telah disempurnakan oleh John Stuart Mills, yang merumuskan arti utilitas sebagai kebahagiaan untuk sebanyak-banyak orang.

2. Pendekatan Resitatif, yaitu dengan merumuskan berbagai kode etik ekonomi yang dapat ditarik dari Al-Quran dan Sunnah terutama yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh.
3. Pendekatan Rasionalitis-Idealistik, yang menghasilkan rumusan tentang konsep rasionalitas ekonomi menurut ajaran Islam. Dari sini dapat dikembangkan berbagai teori dan model-model ekonomi yang bersifat ekonometris dengan dukungan data-data empiris.
4. Pendekatan Adaptif. Sebuah pendekatan yang mencoba mengaitkan antara ajaran-ajaran Islam di bidang etika ekonomi dengan doktrin-doktrin atau ideologi barat yang sudah ada seperti liberalisme dan berbagai ideologi sintesis atau ekletis yang berkembang akhir-akhir ini.³

Pendekatan yang dilakukan oleh Nienhaus ini cukup mewakili variasi pendekatan yang digunakan sarjana-sarjana muslim dalam mengagas ekonomi Islam. Tapi pendekatan ini hanya sebatas digali dari kenyataan empirik-epistemologi-empiris. Nienhaus, sendiri menyatakan bahwa pendekatan rasionalistis-idealistik adalah sebuah pendekatan yang utopis. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Dawam Rahardjo.⁴

Tapi, sebagian sarjana muslim yang belum terbaratkan, dan murni memegang ajaran Islam, menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang mengandung pranata sosial --sistem kehidupan (way of life atau *nidzamu al-hayah*) memiliki sistem perekonomian khas Islam (*nidzam al-iqtishad fi al-Islaam*) sendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya⁵. Inilah, pendapat yang paling tepat.

Bila diambil definisi ahli ekonomi neo-klasik, Lord Robbins⁶, ekonomi adalah, " Suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara berbagai tujuan dan alat-alat (untuk mencapai tujuan) yang langka adanya dan karena itu mengandung alternatif dalam penggunaannya, maka tujuan maupun cara-cara penggunaan alat-alat tersebut untuk mencapai suatu tujuan harus disesuaikan dengan syari'ah Islam sebagai suatu cara dan pandangan hidup. Kegiatan ekonomi menurut pandangan Islam tidak diatur oleh keinginan-keinginan dan pengalaman manusia saja, Tuhan melalui wahyu-Nya telah memberikan pedoman yang kemudian dirumuskan oleh para 'ulama menjadi syari'ah. Kegiatan ekonomi apapun harus disandarkan kepada wahyu yang tercantum dalam Al Quran dan Sunnah.⁷

Kini terlihatlah dengan gamblang, kontradiksi antara sistem ekonomi Islam dengan konsep ekonomi lainnya --kapitalisme dan sosialisme. Kontradiksi ini semakin menyakinkan bila kita sitir pendapat salah seorang ekonom, Bocke, yang menyatakan bahwa nilai-nilai yang

^{*}Penulis artikel ini adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta.

³ Volker Nienhaus, "Islamic Economics; Policy Between Pragmatism and Utopia", dimuat dalam *Economics*, West Germany: Institute for Scientific Cooperation, vol.25, 1982, h. 87-88.

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

⁵ Lihat, 'Abd al-Rahman al-Malikiy, *al-Siyaasat al-Iqtishaad al-Mitsla*, Dr. Husain 'Abdullah, *Dirasaat fi al-Fikr al-Islaamiy*, Samih 'Athif al-Zain, *Al Islam Khuthutun 'Aridhah: Al Iqtishad, Al Hukm, al-Ijtima'*, [Islam; Garis-garis Besar Tentang: Ekonomi, Pemerintahan, dan Masyarakat].

⁶ Definisi ini dikemukakan pertama kali oleh Lord Robbins dalam bukunya, "Essay on The Nature and Significance of Economics Science", London: MacMillan & Co. LTD, 1962. Baca chapter I ("The Subject Matter of Economics") dan chapter II ("Ends and Means").

⁷Pengertian ini dikemukakan oleh S.M Hazanus Zaman; dalam artikelnya, "Definition of Islamic Economics"; Journal of Research in Islamic Economics, vol.1 no.2 , 1984, h. 51.

dianut oleh orang-orang Timur seperti Indonesia tidak cocok bagi dan untuk mendukung perkembangan sekuadron pola barat yang kapitalis.⁸

Demikianlah, ajaran moral yang berbeda akan menghasilkan pola perkembangan ekonomi yang berbeda pula. Hal ini merupakan perkara lumrah, sebab, setiap agama besar pasti memiliki pandangan dasar mengenai manusia, secara eksplisit atau implisit.⁹ Ini adalah bukti nyata ketidakmungkinan membangun ekonomi syari'ah di atas sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik.

Dalam khazanah Islam klasik adalah Imam al-Ghazali, sebagai pelopor pada pembahasan ekonomi yang dikaitkan dengan politik negara. Dalam bukunya *Ihya' 'Ulum al-Diin*, juz II, dalam pokok persoalan, "Halal dan Haram", Al-Ghazali telah meformulakan apa yang disebut oleh ekonomi modern sebagai konsep kepemilikan (property). Dia mengupas apa yang disebut dengan *state property* dalam pasal 7. Pada persoalan etika ekonomi, al-Ghazali menekankan untuk bersikap zuhud; dianjurkannya agar 'ulama bersikap non-kooperatif dengan penguasa. Misalnya, 'ulama dilarang menerima pemberian dari negara.¹⁰

Selain membicarakan masalah-masalah ekonomi secara umum, Al-Ghazali juga memusatkan perhatiannya pada soal keuangan negara, pemasukan dan pengeluarannya (*al-dukhul wa al-mashraf/rekapitulasi*), hukum menerima uang dari negara, serta hubungan ekonomi rakyat dengan pemerintah. Semua ini dituangkan dalam "Halal dan Haram", yang termaktub dalam 7 pasal dalam buku *Ihya' 'Ulum al-Diin*.¹¹ Dalam hal pemasukan uang negara, disebutkan ada 8 sumber pemasukan; (1) *jizyah dan kharaj*, (2) *harta warisan*, (3) *harta waqaf*, (4) *perusahaan dan perkebunan negara*, (5) *perdagangan negara*, (6) *penghasilan-penghasilan karena hukuman*, (7) *Penetapan-penetapan terhadap pedagang*, (8) *Simpanan-simpanan perbendaharaan negara*.¹²

Dalam bukunya "Al-Mustashfa" Ghazali menambahkan, "Apabila pemerintah tidak mempunyai uang dan kas negara tidak cukup untuk menggaji Angkatan Perang sedang negara dalam bahaya karena dikuatirkan musuh datang menyerbu dari luar atau terjadi pemberontakan di dalam negeri dari pihak orang pengacau, maka Imam (Kepala Negara) boleh menetapkan atas orang-orang yang mampu untuk menutup pertahanan negara. Kita mengetahui ada dua bahaya atau dua bencana yang dihadapi, maka harus ditolak bahaya atau bencana yang lebih besar. Tugas keuangan dibayarkan oleh masing-masing orang yang mampu itu adalah kecil, dibanding dengan besarnya bahaya yang mengancam akan keselamatan dirinya dan harta bendanya, kalau negara tidak mempunyai kekuatan (pertahanan), yang akan melindungi keamanan seluruh rakyat dan menolak timbulnya bencana."¹³

Mencari hubungan antara agama dengan ekonomi pada era modern ini memang terasa sangat aneh. Ini disebabkan, kultur masyarakat modern telah tersekulerisasi --meminggirkan dan

⁸J.H.Boeke; *Economics and Economics Policy of Dual Societies*; Harlem: H.D. Tjeeuk Willink, 1951.

⁹Lihat Dr. Muhammad Iqbal; *Islam Sebagai Suatu Cita Moral dan Politik*, Bandung: Pt. Ma'arif, 1981.

¹⁰ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Diin*, Juz.II, h.134.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, juz I, h.203-204. Bandingkan pula dengan Al-Imam al-Haafidz Abi Ubaid, *Kitaab al-Amwaal*, pada bab *Haq al-Imam 'ala al-Ra'iyyah, wa Haq al-Ra'iyyah 'ala al-Imam [Hak Pemimpin atas Rakyat, dan Hak Rakyat atas Pemimpin]*, h.10.

bahkan berupaya untuk melepaskan dari mitologi-mitologi agama--, sehingga mengaitkan antara agama dengan kehidupan ekonomi terasa agak ganjil.

Tapi Adam Smith, dalam bukunya berjudul *The Wealth of Nation*, telah banyak berbicara tentang agama, gereja, sekte- sekte agama, moral dan etika.¹⁴ Pada masanya, ilmu ekonomi yang masih disebut sebagai ekonomi politik (*political economy*) itu merupakan bagian dari filsafat, moral (moral philosophy), yaitu nama dari ilmu-ilmu sosial pada waktu itu.¹⁵

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas perilaku manusia (*morales*) dan berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut. Thomas Malthus juga berbicara mengenai pengaruh kendala moral dalam pembahasannya mengenai perilaku ekonomi dan kependudukan. Karl Mark dan Engels, juga tidak kurang berbicara mengenai agama Kristen dan Yahudi sebagai faktor yang mempengaruhi sikap-sikap dan perilaku ekonomi. Karena itu, Max Weber tidak membicarakan sesuatu yang sama sekali baru, ketika ia menerbitkan dua buah artikelnya pada tahun 1904 dan 1905 yang kini kita kenal dengan bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*.¹⁶

Hubungan antara agama dengan perilaku ekonomi dan sejarah, menurut Kenneth Boulding, adalah, pengaruh agama terhadap ekonomi dan sejarah lebih besar daripada pengaruh agama terhadap pemikiran ekonomi dan sejarah. Agama turut mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai jenis komoditi yang diproduksi, terbentuknya institusi dan tentu juga praktek-praktek atau perilaku ekonomi¹⁷.

Dawam Rahardjo mengatakan bahwa mayoritas ekonom muslim tidak pernah membahas persoalan-persoalan yang rudimenter, seperti, apakah nilai-nilai Islam itu menunjang perkembangan ekonomi atau tidak, sebagaimana yang masih menjadi pertanyaan para ahli teori ilmu-ilmu sosial Barat sejak Weber. Sikap yang diambil oleh para pakar muslim adalah -- khususnya dibidang ekonomi- berusaha memahami ajaran-ajaran Islam dan konteks persoalan sekarang dan kemudian memperkirakan pengaruh atau dampak penerapan nilai-nilai Islam tersebut terhadap perkembangan ekonomi, baik dalam perspektif komparatif dengan berbagai pola pertumbuhan ekonomi yang ada maupun dalam rangka mencari pola yang ideal yang dikehendaki.¹⁸ Berbeda dengan Dawam, Dr. 'Abd al-Rahman al-Malikiy, justru mengkritik dan menolak sama sekali sistem ekonomi ala kapitalisme, dan sosialisme, bahkan meletakkan kontruks mendasar bagi politik ekonomi Islam.¹⁹ Masalahnya bukan terletak pada kontribusi Islam untuk melengkapi sistem ekonomi kapitalis dengan nilai-nilai normatif Islam, tapi, menghadirkan kembali sistem ekonomi Islam. Pandangan ini secara tegas menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam memang ada.²⁰

¹⁴ Adam Smith, *The Wealth of Nation*, New York: The Modern Library,; 1937; h.745-746, dan 741-768.

¹⁵ Robert L. Heilbroner, *The Worldly Philosophers*, New York: A. Touchstone Book, 1970.

¹⁶ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, terjemahan Talcott Parsons, London: Unwin University Book, 1974. catatan kaki Chapter I No.189.

¹⁷ Lihat *Religious Perspektive on Economics*, dalam Kenneth E. Boulding ; *Beyond Economics, Essay on Society, Religion and Ethics*, The University of Michigan, Ann Arbor, 1970; h. 180-181. Lihat pula Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, h.27

¹⁸ Dawam Rahardjo, *ibid.*, h.62

¹⁹ Dr. 'Abd al-Rahman al-Malikiy, *al-Siyaasat al-Iqtishaadiyyah al-Mitsla*, 1963, h.5-34.

²⁰ Tentang garis-garis besar sistem ekonomi Islam, dapat dirujuk semisal, Dr. Husain 'Abdullah dalam *Dirasaat fi al-Fikr al-Islamiy*, Bab Nidzam al-Iqtishaad fi al-Islaam.

B. Sistem Ekonomi dalam Perbandingan

Diskusi mengenai ada atau tidak adanya sistem ekonomi Islam bermula dari perbedaan pendekatan dalam mengkontruksi model ekonomi "khas ala Islam". Perbedaan perspektif tentang model sistem ekonomi Islam banyak dipengaruhi oleh proses pembelajaran, kultur sosial, sejauh mana pemahaman terhadap ajaran Islam, dan sejauh mana keterlibatan mereka dengan sistem-sistem ekonomi bukan Islam. Walaupun dari pendekatan tersebut satu sisi telah menghasilkan perbedaan pada konstruk ekonomi yang hendak digagas, tapi ada kesamaan pandangan yang konsisten, yakni masing-masing aliran berupaya membentuk sistem ekonomi dengan etika Islam, sebagai moral dan etiknya. Pendekatan pertama, lebih menekankan pada substantifnya, sedangkan pendekatan kedua menekankan pada bentuk-bentuk simbolisnya. Beberapa ekonom muslim yang tidak begitu mempersoalkan simbol-simbol empirik ekonomi, menganggap bahwa, sistem apapun yang diterapkan pada hakekatnya sama baiknya. Persoalan penting dan mendesak adalah mengisi sistem tersebut dengan nilai-nilai, atau etika Islam. Sedangkan kedua, menganggap bahwa bagaimanapun juga bentuk substantif tidak akan pernah dapat dipisahkan dari bentuk simbolisnya, tatkala hendak mengkontruksi model ekonomi khas tertentu. Semisal, ketika Mubyarto merumuskan sistem ekonomi Pancasila, ia memberikan justifikasi bahwa sistem ekonomi Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Sistem ekonomi Pancasila didefinisikannya sebagai, "..... *ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong....* Sedangkan kegotong royongan di sini adalah kegotong-royongan nasional, bukan hanya kegotong-royongan urban, atau rural.²¹

Tapi tatkala berbicara pada tataran etika, Mubyarto, menemukan jalan buntu. Mengingat bahwa, masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam –tentunya menganut etika Islam. Padahal etika Islam berbeda dengan etika Pancasila. Pada saat Pancasila dianggap juga sebagai jiwa atau moral etika sistem ekonomi Pancasila, maka pada saat yang sama maka norma agama --yakni Islam-- tentunya akan tersingkir, atau agama (Islam) diposisikan sekedar sub etika residual yang mendukung Pancasila. Hal semacam ini tentunya, akan menyinggung umat Islam, karena berimplikasi Islam akan ditafsirkan sesuai dengan kehendak Pancasila (manipulasi residual terhadap religiusitas Islam).

Dengan demikian, signifikansi kontruksi sistem ekonomi Islam tidak hanya ditetapkan berdasarkan muatan etikanya saja --Islam atau tidak--, tapi harus diarahkan kepada upaya pembentukan ekonometri dan sistem ekonomi Islam. Akan lebih tepat kalau digunakan pendekatan sistemis, dengan cara mengkalkulasi secara kualitatif maupun kuantitatif sistem ekonomi khas Islam, maka dengan segera etika Islam akan tercakup di dalamnya. Sedangkan pendekatan substantif –atau pendekatan adaptif--, mempunyai kelemahan, yakni suatu saat akan terbentur kepada bentuk-bentuk formal atau empirik khas ekonomi Islam, yang bisa jadi bertentangan secara diameterikal dengan sistem ekonomi selain Islam. Misalnya, Islam melarang apapun bentuk riba, dan penimbunan barang, sedangkan dalam sistem kapitalis kedua hal ini diperbolehkan. Islam juga telah melarang negara melakukan intervensi terhadap

²¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila; Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3S, cet-1; 1987; h.32.

harga dengan dalih proteksi konsumen atau produsen. Islam juga menetapkan kualifikasi terhadap barang-barang yang bernilai ekonomis; misalnya, khamr, daging babi, dan jasa-jasa yang bertentangan dengan sistem Islam, sebagai sesuatu yang tidak bernilai ekonomis.²²

Akibatnya, bila pendekatan adaptif diadopsi, kita akan mengalami kesulitan di dalam memberikan ciri etika dan norma-norma khas Islam. Pendekatan ini justru akan mengeleminir kemurnian dan logika berfikir Islami. Islam harus digali dan dipahami apa adanya baik dari teks maupun konteks al-Quran dan Sunnah, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan memahami al-Quran dan Sunnah untuk dipaksasesuaikan dengan ajaran-ajaran kapitalis, atau hanya menempatkan ajaran Islam sebagai ajaran moral dan etika. Pendekatan ini (adaptif) hanya akan memerankan Islam sebatas ‘penambal’ kebobrokan sistem kapitalis.²³ Sistem ekonomi kapitalis lahir dari suatu peradaban yang memiliki semangat untuk menolak dan mengeleminir peran agama dalam kehidupan. Padahal, pada saat yang sama seorang muslim memiliki tanggungjawab melaksanakan seluruh ajaran Islam.

Hingga tahun 1776 Barat masih menyebut sistem ekonomi dengan istilah ekonomi politik (*political economy*) dan bukan disebut sebagai economics. Political Economy adalah suatu ilmu kemasyarakatan modern yang membahas hubungan antara proses-proses politik dan ekonomi.²⁴ Sedangkan dalam kamus Inggris dikenal berbagai istilah "international political economy", "global political economy", "political economy of international relations", "politics of global economic relations", dan "international political economics". Sedangkan yang populer, EPI adalah studi mengenai "who gets what kind of values, how much and by what means", yaitu suti yang memusatkan perhatian pada persoalan distribusi nilai-nilai seperti, kekayaan, dan kebutuhan materiil, keamanan dan ketertiban, keadilan, dan kebebasan.²⁵ Atau mengenai "distributive justice"²⁶, atau mengenai EPI didefinisikan oleh Robert A. Isaak, sebagai "*study of the inequality or asymmetry between nations, and people and the collective learning and positioning patterns that preserve or change this asymmetry*".²⁷ Dirumuskan oleh penulis yang lain bahwa EPI adalah *the study of the inter play of economics and politics in the world*.²⁸ Demikianlah, ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan; sedangkan politik sebagai himpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi dapat dilihat dari perkembangan pemikiran mulai madzhab klasik, neoklasik, dan ekonomi modern. Madzhab klasik, semisal diwakili oleh; Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill; madzhab neo klasik, diwakili oleh Alfred Marshall, dan Leon Walras; dan madzhab modern diwakili oleh John Mynard Keynes.

²² Nabhani, *Nidzamu al-Iqtishodiy*, 1953; Beirut, tanpa penerbit. Bandingkan dengan ‘Abd al-Qaddim Z, *Nidzaam al-Hukm fi al-Islaam*, pada bab *Mahkaamah al-Madzaalim*.

²³ Bandingkan dengan Dr. Husain ‘Abdullah, *Mafaahim Islam juz I dan II*.

²⁴ Lihat, Mubyarto; *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*; LP3ES, h.7.

²⁵ Susan Strange; "Structure, Values, and Risk in the Study of the International Political Economy", dalam R.J. Barry Jones, *Respectives on Political Economy*, London, Francis Pinter, 1983, h. 211.

²⁶ Edward Weisband, ed. *Poverty Amidst Plenty: World Political Economy and Distributive Justice*"; Boulder, CO: Westview, 1989.

²⁷ Robert A. Isaak, *International Political Economy*.

²⁸ Jeffry A. Frieden & David A. Lake, ed.; *International Political Economy Perspektives on Global Power and Wealth*; New York; ST. Martin's, 1991, h.1.

Madzhab klasik, dimulai oleh perkembangan dan pematangan pemikiran Adam Smith, yang kemudian disempurnakan oleh David Ricardo. Perkembangan selanjutnya muncul John Stuart Mill elakukan kritik terhadap pemikiran ekonom-ekonomi terdahulu engan mengajukan postulat konomi untuk kebahagiaan semuanya, yakni dengan cara membawa tensi ke arah pemikiran berbau filsafat sosial. Ini terlihat dalam bukunya yang terbit pada tahun 1838, berjudul; *Principles of Political Economy, With Some of Their Applications to Social Philosophy*. Pada madzhab sebelumnya pemikiran ekonomi diarahkan oleh pemikiran Smith yang menyatakan bahwa untuk majunya perekonomian, pembagian produk masyarakat, terpaksa harus tidak merata. Mill memprotesnya, dengan mengajukan pernyataan bahwa produksi dan distribusi harus dibedakan. Produksi memang dikuasai dan diatur oleh hukum-hukum alam yang tetap, tapi hal ini berbeda dengan distribusi, karena distribusi tergantung semata-mata oleh kemauan manusia (*human will*).

Tidak demikian halnya dengan persoalan pembagian kekayaan. Persoalannya semata-mata menyangkut kelembagaan manusia. Sekali lembaga itu sudah ada manusia, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dapat berbuat apa saja sesuai keinginannya. Mereka bisa menempatkannya bagi siapapun yang mereka kehendaki dan dengan kondisi apa saja²⁹.

Dengan demikian pembagian kekayaan tergantung pada hukum dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang menentukannya adalah yang dibuat oleh bagian masyarakat yang memerintah, dan yang begitu berbeda dari waktu ke waktu dan dari negara yang satu ke negara yang lain, dan mungkin juga akan masih berbeda lagi, apabila kemanusiaan memang menghendakinya.³⁰

Penemuan ini mempunyai konsekuensi yang dalam dan luar biasa. Seluruh perdebatan mengenai ekonomi sejak saat itu dipindahkan dari bidang hukum alam yang "non personal" dan tak terelakkan kembali ke ruang lingkup *etika dan moralitas*. Muncullah kemudian penolakan terhadap pemikiran Mill dari Karl Mark, yakni dengan terbitnya sebuah makalah berjudul *Manifesto Komunis*, yang kemudian melatarbelakangi ekonomi sosialis. Pecahlah kemudian paham ekonomi menjadi pertama; madzhab neoklasik yang sampai sekarang dipelajari orang (*termasuk para ekonomi Indonesia*), dan kedua, adalah madzhab sosialis, yang diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan negara-negara Komunis di Asia Timur.

Setelah tenggelamnya madzhab klasik, muncul kemudian madzhab ekonomi neo-klasik yang lebih menekankan pada pendekatan dan analisa ekonomi mikro. Pada masa-masa inilah muncul perkembangan baru dalam analisa-analisa ekonomi matematis. Semisal buku karangan Alfred Marshal, yang berjudul *Principles of Economics*, yang terbit pada tahun 1890. Ciri utama dari madzhab neoklasik adalah; ilmu ekonomi merupakan ilmu memilih dalam keadaan kelangkaan, dan tujuannya adalah "mencapai efisiensi dan menemukan keadaan keseimbangan yang optimal. Teknik analisa yang menggambarkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang bersifat abstrak, didefinisikan oleh Lionel Robins bahwa ilmu ekonomi adalah; ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat pemenuhan yang terbatas yang mempunyai alternatif penggunaan (1935). Pengertian ini bila di bawa ke titik ekstrim, maka

²⁹ John Stuart Mill, *Principles of Political Economy, With Some of Their Application to Social Philosophy*; August M. Kelley Publishers, Fairfield 1977; h. 200.

³⁰ *Ibid.h.200.*

ilmu ekonomi yang benar-benar menjadi alat dan metode berpikir semata, yakni metode berpikir rasional dan praxiology.

Penggunaan matematika terutama deferensial dan integral untuk mengetahui batas-batas marginal, maka dalam *Principles of Economy* (1890), Alfred Marshall yang juga seorang ahli matematika merasa perlu mengingatkan batas-batas penggunaan matematika.³¹ Manfaat yang paling penting dari matematika murni bagi pertanyaan-pertanyaan ekonomi, hanyalah untuk menolong seseorang untuk menulis secara cepat, singkat, dan tepat apa yang dipikirkannya untuk dirinya sendiri, dan untuk memastikan bahwa ia memiliki cukup premis (dasar) bagi kesimpulannya.³²

Dengan demikian Alfred Marshall menekankan bahwa ilmu ekonomi harus bersifat terapan (praksis).³³ Menurutnya ilmu ekonomi harus bertujuan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dengan bukunya *Principles of Economics* ini Alfred Marshall menjadi Bapak Ekonomi Neoklasik, atau Bapak Teori Ekonomi Mikro.

Setelah madzhab Neoklasik muncul kemudian, madzhab modern yang dimunculkan oleh Keynes dengan bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936). Buku ini lahir ketika terjadi depresi dunia pada tahun 1929. Keynes beranggapan bahwa terjadinya krisis dunia pada tahun 1929-1933 membuktikan bahwa teori ekonomi klasik dan neoklasik terbukti mempunyai kelemahan mendasar. Pengangguran besar-besaran tetap terjadi selama kurun waktu yang cukup lama, padahal menurut teori ekonomi klasik dan neoklasik tidak mungkin terjadi pengangguran besar-besaran.

Pendapat Keynes yang paling mencengangkan adalah bahwa terjadinya depresi dunia besar-besaran ini bukan dikarenakan kelemahan para praktisi ekonomi, tapi dikarenakan kesalahan dasar dari teori ekonomi yang diterapkan:

1. “*Cacat utama perekonomian di mana kita hidup adalah kegagalannya memberikan pekerjaan penuh dan pembagian kekayaan serta pendapatan yang tidak adil dan arbiter*”³⁴.
2. “*Saya percaya bahwa memang ada justifikasi sosial dan psikologi bagi ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, tapi tidaklah harus terlalu besar seperti yang kita saksikan dewasa ini.*³⁵

Di kemudian hari, pemikiran Keynes mampu mempengaruhi para ekonom dunia untuk mengkaji ulang paradigma ekonomi selama ini. Lebih lanjut Keynes menyatakan bahwa ilmu ekonomi lebih merupakan metode, daripada sekadar doktrin, peralatan, pemikiran dan teknik berpikir.

Sedangkan madzhab pemikiran terakhir adalah madzhab pemikiran kontemporer. Tokoh dibalik madzhab ini adalah Gunnar Myrdal, seorang ekonom dari Swedia. Buku Myrdall yang paling terkenal adalah, *Asian Drama: An Inquiry into Poverty of Nations*, dan bertolak belakang dengan Adam Smith --lihat buku Adam Smith yang berjudul; *Wealth of Nations : An Inquiry into*

³¹ Lihat Mubyarto; *Ekonomi Pancasila; Gagasan dan Kemungkinan*; 1987; LP3ES; Jakarta; h. 11.

³² *Ibid.*, Lihat juga kutipan ini dalam edisi aslinya; Alfred Marsh, *Principles of Economics*; New York: The MacMillan Company; 1948, h. x

³³ *Ibid.h.2.*

³⁴ J.M. Keynes; *The General of The Employment Interest and Money*; Tokyo, Maruzen Co. 1957; h. 327.

³⁵ *Ibid*; 374.

the Nature and Causes of Wealth Nations-- walaupun dengan menggunakan alat analisa yang sama. Tulisan-tulisan Myrdall memang radikal; sebagai kritik terhadap teori ekonomi ortodok.³⁶

Gagasan penting lainnya dari Myrdall adalah bahwa kajian ekonomi harus juga memasukkan faktor-faktor non ekonomi³⁷. Tapi, membaca teori-teori ekonomi kapitalistik tidaklah cukup sebelum membaca *Das Capital*-nya Karl Mark, sebab, dalam *Das Capital*, Karl Mark (1867) telah melakukan analisa dan kritik tajam terhadap konsep dan pemikiran kapitalis, terutama distribusi. Ini bisa dirasakan dari keinginan yang menggebu-gebu dari Karl Mark untuk menciptakan apa yang disebut dengan "*equality*".

Formulasi Islam untuk sistem dan ilmu ekonomi, secara sistematis-praktis telah dituangkan dalam banyak kitab fiqh terutama dalam bab mu'amalah.³⁸ Sistem kehidupan apapun --termasuk di dalamnya ekonomi--selalu dibangun di atas pandangan hidup tertentu tentang kehidupan. Sistem sosial Islam didasari oleh sebuah pandangan bahwa, manusia harus tunduk dan pasrah terhadap ketentuan- ketentuan *profan* dari Tuhan, yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam kitab-kitab fiqh terdapat sub-sub pembahasan yang berhubungan dengan hudud, jinayat, mu'amalah, dan lain-lain. Sub-sub ini telah menunjukkan bahwa, Islam, dalam bentuk praktis telah dituangkan dalam ajaran-ajaran yang bersifat praktis. Imam empat madzhab, serta imam-imam lain pun telah menyusun pokok-pokok perincian, kaedah-kaedah, postulat-postulat, serta hukum-hukum praktis berkaitan dengan praktek-praktek kehidupan masyarakat³⁹. Meskipun upaya untuk merasionalkan --merumuskan teori-teori ekonomi Islam—belum dilakukan oleh pemikir Islam klasik, tapi karangan-karangan mereka sedikit banyak telah memberikan gambaran praktis dan aplikatif perilaku ekonomi Islam⁴⁰.

Upaya untuk menempatkan Islam dalam konteks sistem ekonomi dan ekonomi terapan, serta komparasi sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dilakukan dengan cemerlang oleh Dr. Abdurrahman al-Malikiy, dan Qadli Nabhani dalam buku *al-Siyaasat al-Iqtishaad al-Mitsla*, dan *Nidzam al-iqtishad fi al-Islam*.⁴¹ Bahkan, keduanya telah berhasil membahas kembali sistem ekonomi dengan bahasa kontemporer, serta sisi unggul sistem ekonomi Islam atas sistem ekonomi lainnya. Keduanya tidak hanya membandingkan sistem-sistem ekonomi tersebut, dari sisi praktis empiris, tapi, lebih dari itu, keduanya juga menghadirkan secara filosofis dan paradigmatis-teoritis, pandangan dasar, serta hukum-hukum yang menyertai sistem ekonomi tersebut.⁴²

³⁶ lihat buku Myrdal; *Against the Stream; Critical Essay on Economics*; New York; Vintage Books, 1975; h. 14.

³⁷ Gunnar Myrdall; *The Political Element in the Development of Economics Theory*; A. Clartton Book; New York; Simon and Schuster, 1969; h. 2

³⁸ Imam Syafi'i, *al-Umm*. Ibnu Hajar, *Fath al-Baariy* [kitab hadits yang disusun dalam pembahasan fiqh], Imam Syaukani, Nail al-Authaar; dll.

³⁹ Lihat semisal, *Al-umm*, karya Imam Asy-Syaifi'i, *Al-muwaththa'* (kumpulan hadits hukum), oleh Imam Malik, *Al-muwafaqaat*, *Bidayatul Mujtahid*, Fiqh Sunnah, dan lain-lain. Ciri kajian ekonomi Islam klasik, adalah bersifat praksis, sehingga pembahasan dalam tataran-tataran paradigma-sistemis jarang sekali disinggung oleh ‘ulama-ulama madzhab klasik.

⁴⁰ Ilmu ekonomi dalam Islam ditermakan dengan istilah “*iqtishad*”, sedangkan para pelaku ekonomi dinamakan dengan “*muqtashid*”. Tentang *needs*, Al-Ghazali membahas bahwa kebutuhan manusialah yang mendorong lahirnya perilaku ekonomi dan perkembangan ilmu dan sistem ekonomi. Lihat dalam *Ihya' 'Ulumu al-diin*; Al-ghazali. Sedangkan dalam h etika, Al-Ghazali mengarang kitab berjudul, *Al- adabu Al-kasabu wa Al-ma'asiy*. Begitu pula Al-Farabi, Ibnu Rusyd telah menyumbangkan pemikiran ekonomi yang dikaitkan dengan politik negara

⁴¹ Dr. 'Abd al-Rahmaan al-Maalikiy, *al-Siyaasat al-Iqtishaad al-Mitsla*, 1963.

⁴² *Ibid.*

Sejauh ini, kedua pakar tersebut, cukup berhasil meletakkan konsep dasar ekonomi Islam,⁴³ kemudian menuangkannya dalam sistem ekonomi (*economic system*). Pemikiran yang menonjol dari kedua pakar tersebut adalah; membagi topik pembahasan sistem ekonomi Islam menjadi tiga pembahasan mendasar; yakni (1) *konsep kepemilikan (property)*; (2) pemanfaatan dan *pengelolaan kepemilikan*; (3) distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Dari tiga konsep dasar ini dikembangkan secara rinci pada sub-sub bab penting, kemudian dibandingkan satu persatu dengan pandangan kapitalis, dan sosialis.

Menurut Dr. 'Abd al-Rahman al-Maalikiy, sistem ekonomi kapitalis dibangun berdasarkan sebuah perspektif bahwa ekonomi menurut pandangan mereka adalah sesuatu yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (*needs*) manusia, beserta alat-alat (*goods*) pemuasnya. Sistem kapitalis dibangun dengan tiga kerangka dasar:

1. Adanya kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan jasa-jasa yang berhubungan dengan manusia. Dimana mereka beranggapan bahwa barang dan jasa tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia yang beragam dan terus-menerus bertambah kuantitasnya. Dan inilah masalah ekonomi menurut mereka.
2. Nilai (*value*) suatu barang yang dihasilkan, itulah yang menjadi dasar penelitian ekonomi, bahkan paling sering dikaji.
3. Harga (*price*) berhubungan dengan fungsi harga dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Bahwa adanya kelangkaan dan keterbatasan barang dan jasa itu, memang ada pada karakteristik barang dan jasa itu, sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Kapitalis berpendapat bahwa kebutuhan manusia harus dipenuhi.⁴⁴ Karena itu, harus ada alat-alat (*goods*) untuk memenuhi kebutuhan manusia tadi. Akhirnya, mereka memahami bahwa alat dan barang hanyalah alat pemuas bagi kebutuhan materi saja. Sedangkan jasa adalah alat pemuas bagi kebutuhan yang bisa dirasakan tapi tidak bisa diindera.

Barang dan jasa bisa dijadikan sebagai alat pemuas, jika di dalamnya terkandung *utility* (kegunaan). Bagi mereka, keberadaan utility sangat tergantung pada pandangan ada atau tidak adanya kegunaan tersebut pada suatu barang dan jasa. Mereka mendefinisikan kebutuhan sebagai *keinginan*. Akhirnya suatu barang dianggap *barang berguna*, jika barang tersebut diinginkan oleh khalayak, baik yang bersifat barang yang bersifat primer maupun non primer, dan apakah barang tersebut secara subyektif memberikan kepuasan (*satisfaction*) pada sebagian orang atau tidak menurut orang lain.⁴⁵

⁴³ Pembahasan senada dilakukan oleh Dr. Muhammad Husein Abdullah, dalam kitab *Dirasatu fi Al-fikriy al-Islamiy*, Darul Bayaariq; Beirut, 1991; pada bab *Usus al-Nidzaam al-Iqtishaad fi al-Islaam*, (Asas-asas Sistem Perekonomian Islam).

⁴⁴ Menurut Dr. Husein Abdullah, dalam bukunya *Mafahim Islam; Daar al-Bayaariq*; bahwa manusia mempunyai potensi hidup berupa *pertama*; kebutuhan materi (*hajat al-'udlwiyyah*); *kedua*; kebutuhan akan naluri (*gharizah*). Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan mutlak dan harus dipenuhi oleh manusia. Sifat pemenuhannya pasti, sehingga apabila tidak dipenuhi maka dapat mengganggu eksistensi manusia tersebut –mengakibatkan kematian atau kerusakan jasmaninya. Sedangkan kebutuhan naluriah (*gharizah*) sifat pemenuhannya tidak pasti, dalam arti seandainya manusia tidak memenuhinya tidak akan mengganggu eksistensi manusia tersebut, hanya saja menimbulkan keguncangan jiwa manusia. Dengan demikian, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak pasti pemenuhannya, yakni kebutuhan naluriah.

⁴⁵ Lihat Qadli Nabhani , *al-Nidzaam al-Islaamiy fi al-Islaam*, 1990, h. 33

Oleh karena itu mereka tidak pernah membahas karakteristik benda atau barang; apakah barang tersebut bermanfaat, atau berbahaya bagi kehidupan manusia. Menurut mereka, khamr, cандu adalah benda yang memiliki *utility* (*kegunaan*), sebab benda-benda tersebut masih diinginkan oleh orang banyak. Pelacuran laki dan perempuan; merupakan jasa yang mempunyai *utility* (*kegunaan*), sehingga sah-sah saja jasa semacam ini. Ekonom kapitalis tidak pernah membahas topik semacam ini dalam membangun sistem perekonomian mereka. Mereka disibukkan dengan pembahasan bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan alat-alat pemusas --baik kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Ketika mereka berasumsi bahwa alat pemusas kebutuhan manusia tidak mencukupi kebutuhan manusia (terbatas) --karena kebutuhan manusia tidak terbatas--, maka mereka menarik kesimpulan bahwa problem ekonomi adalah terbatasnya alat pemusas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Akibat dari kelangkaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi, muncullah problem ekonomi.⁴⁶

Selama pandangan mengenai kebutuhan dan pemenuhan tetap seperti itu, pada dasarnya sistem ekonomi kapitalis telah memandang bahwa persoalan ekonomi bagi mereka melulu hanya sebatas pada “kebutuhan dan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut”, bukan kepada manusianya.⁴⁷ Pandangan semacam ini berdampak pada kesibukan mereka untuk mencari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa, agar kebutuhan manusia bisa terpenuhi⁴⁸. Padahal, nilai barang atau jasa merupakan sebutan untuk nilai yang hakiki bukan sebutan atas nilai yang bersifat dugaan atau nisbi (relatif). Nilai adalah sesuatu yang mempunyai fakta dan disandarkan kepada realitas tersebut. Atas dasar ini, pandangan ekonom kapitalis terhadap nilai sangatlah keliru.⁴⁹

Konsep nilai batas (*marginal value*), yaitu perkiraan bagi tingkat produksi yang disesuaikan dengan tingkat kecenderungan penjualan barang-barang, memberikan implikasi nilai barang itu akan ditentukan berdasarkan batas paling rendah, sehingga produksinya tetap terus berjalan dengan pijakan yang bisa dijamin. Nilai batas (*marginal value*) ini hakekatnya bukan nilai barang, bahkan tidak ada kaitannya dengan harga. Nilai barang ditentukan semata oleh guna (*utility*) barang tersebut dengan memperhatikan kelangkaannya pada saat tertentu. Setelah itu, turunnya harga barang tidak akan mempengaruhi nilai barang, sebagaimana naiknya harga barang tidak dapat menambah nilai barang. Sebab nilai barang telah ditentukan. Dengan demikian teori batas (*marginal theory*), hakekatnya adalah teori tentang harga, bukan teori tentang nilai. Dalam hal ini sebenarnya ada perbedaan antara harga dengan nilai --termasuk menurut kalangan kapitalis sendiri. Perkiraan *harga* ditentukan berdasarkan banyaknya permintaan dan sedikitnya penawaran, atau banyaknya penawaran dan sedikitnya permintaan secara bersamaan. Dan harga merupakan sesuatu yang terkait dengan bertambahnya produksi dan bukan terkait dengan pendistribusian. Sedangkan nilai; perkiraannya ditentukan oleh manfaat (*utility*) yang terdapat pada barang ketika barang tersebut diukur manfaatnya, dengan memperhatikan kelangkaannya, tanpa memasukkannya sebagai bagian dari perkiraan tersebut. Juga tidak dipengaruhi oleh besar

⁴⁶ *Ibid.* 34

⁴⁷ *Ibid.* 35

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* 36

kecilnya penawaran dan permintaan⁵⁰. Inilah kesalahan mendasar tentang teori nilai dalam ekonomi kapitalis⁵¹.

Begitu pula persepsi mereka tentang manfaat. Mereka mendefinisikan manfaat adalah jerih payah yang telah dicurahkan oleh manusia. Maka apabila upah yang diberikan tidak sebanding dengan kerjanya tingkat produksi akan menurun. Karena itu metode yang tepat untuk mendistribusikan kekayaan kepada anggota masyarakat adalah cara yang seharusnya dapat menjamin tercapainya tingkat produksi setinggi-tingginya⁵².

Persepsi ini tidak sesuai dengan fakta, karena kekayaan yang telah diciptakan oleh Allah untuk manusia di alam ini merupakan standar penentuan manfaat barang itu sendiri. Sedangkan sejumlah biaya (cost) yang telah dikorbankan untuk menambah manfaat kekayaan tersebut atau mengupayakan manfaat kekayaan tersebut dengan disertai tindakan tertentu; inilah yang dengan pasti menghasilkan manfaat. Sehingga anggapan bahwa manfaat itu hanya semata-mata jerih payah manusia adalah keliru bertentangan dengan kenyataan dan tidak memperhatikan adanya bahan baku dan serta biaya-biaya yang telah dikorbankan.⁵³

Merosotnya tingkat produksi bukan dikarenakan tidak seimbangnya antara upah dengan kerja, tapi bisa jadi ditimbulkan karena cost-cost yang dikeluarkan terlalu besar. Merosotnya GNP Inggris dan Perancis pada tahun 1929 misalnya, bukan diakibatkan karena tidak seimbangnya tingkat upah dengan kerja, tapi dikarenakan menyusutnya daerah-daerah jajahan mereka yang kaya. Sedangkan merosotnya GNP AS pada saat terjadinya Perang Dunia II bukan karena ketidakseimbangan antara tingkat upah dengan kerja, melainkan karena AS berperang habis-habisan melawan Jerman.⁵⁴

Kapitalis berpendapat, bahwa distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat ditentukan oleh harga. Manusia akan mengoleksi barang sesuai dengan harga barang yang mampu ia beli. Karena itu, naik turunnya harga barang akan menjadi penentu distribusi barang dan jasa.⁵⁵ Pandangan ini, sebenarnya justru telah menciptakan dominasi ekonomi pada pihak-pihak tertentu saja, terutama pihak yang memiliki kemampuan uang dan modal lebih.⁵⁶ Ini adalah garis-garis besar sistem ekonomi kapitalis.

Adapun garis-garis besar sistem ekonomi sosialis, dan kritik terhadap sistem ekonomi tersebut juga dipaparkan cukup gamblang oleh Dr. Abd al-Rahman al-Malikiy dan Nabhani di dalam bukunya yang berjudul, "al-Siyaasaat al-Iqtishaad al-Mitsla", dan "al-Nidzaam al-Iqtishaad fi al-Islaaam".⁵⁷ Secara umum, sistem ekonomi sosialis memiliki konsep dasar sebagai berikut:

- a. Pertama, mewujudkan kesamaan (equality) secara riil.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Ibid.

⁵²Ibid. h.37

⁵³Ibid. h.37-38

⁵⁴Ibid. h.38

⁵⁵Ibid. h.38-39

⁵⁶Ibid. h.39-40

⁵⁷ Ibid. h.40-56

- b. Kedua, penghapusan kepemilikan individu (*private property*), baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ketiga; mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.⁵⁸

Dari sisi pewujudan kesamaan secara riil, terdapat perbedaan pendapat pada aliran sosialisme. Ada sekelompok aliran yang disebut dengan "*kesamaan hisabiyah*". Yaitu, kesamaan yang berhubungan dengan apa-apa yang dapat dimanfaatkan. Aliran ini berpendapat bahwa, setiap individu akan diberi sesuatu yang sama, sebagaimana yang lain. Ada pula sekelompok yang disebut dengan "*kesamaan suyu'iyah*", yakni pembagian kerja harus didasarkan pada kemampuan masing-masing orang, dan pembagian produksi didasarkan pada kebutuhan individu.⁵⁹ Ada juga, aliran yang disebut dengan "*kesamaan alat-alat produksi*", ditinjau dari sisi bahwa benda (materi) pada kenyataannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap individu; sehingga mutlak mengikuti kaedah distribusi, "*Masing-masing sesuai dengan kekuatannya (kemampuannya), dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan kerjanya (aktivitas)*".⁶⁰

Dari aspek penghapusan kepemilikan individu (*private property*) mereka berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa kepemilikan individu harus dihapus secara total. Ini yang disebut dengan aliran Komunisme. Aliran lain, menyatakan bahwa kepemilikan individu yang harus dihapuskan adalah kepemilikan yang berhubungan dengan barang-barang produktif, atau disebut dengan capital (modal). Dengan demikian aliran ini menghapuskan kepemilikan individu pada barang-barang yang dapat menghasilkan faktor produksi, semisal, tanah, rel, industri, pertambangan, rumah yang disewakan, pabrik, dll. Tapi, mereka masih mentolerir kepemilikan terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif. Begitu pula kepemilikan rumah yang sekedar untuk tempat tinggal (bukan untuk disewakan). Aliran ini disebut dengan *Sosialis-Kapitalis*. Ada pula aliran yang disebut dengan *Sosialis-Pertanian*. Aliran ini berpendapat bahwa kepemilikan individu yang harus dihapuskan hanya menyangkut kepemilikan tanah pertanian, tidak lebih dari itu. Ada pula yang menyatakan bahwa, "*Dilihat dahulu setiap hal yang didalamnya terdapat kepentingan umum yang bisa merubah kepemilikan khusus (individu) kepada kepemilikan umum. Dan membatasi para pemilik dalam banyak hal agar negara (pembuat undang-undang), membuat batasan-batasan tertinggi untuk sewa dan batas terendah terhadap upah. Tapi, pekerja dibiarkan mendapatkan modal dan sebagainya.*" Aliran inilah yang disebut dengan Sosialis Negara.⁶¹

Dari sisi penentuan sarana yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan, dalam aliran sosialisme terjadi perbedaan pendapat. Ada aliran yang disebut dengan 'aliran *Naqabiyah Tsauriyyah*'⁶². Aliran beranggapan bahwa kebebasan para pekerja, dan tenaga kerja, sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Semisal dengan cara memperbanyak kerja, dan merusak alat produksi, dan menyebarkan etos kerja di kalangan pekerja, serta persiapan-persiapan lainnya, sehingga pada suatu titik, perekonomian terhenti sama sekali, yang mengakibatkan runtuhnya sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan Sosialis Marxisme, berpendapat

⁵⁸ Lihat paparan ini dalam; Qadli Nabhani, *Nidzam al-Iqtishadiyy fi al-Islam (Sistem Ekonomi Dalam Islam)*, ed. IV, 1990, Daar al-Ummah, Beirut, h.42

⁵⁹*Ibid.* h. 42. Aliran ini (kesamaan suyu'iyah) mendasarkan pembagian ini dengan suatu kaedah, "Setiap orang (akan diberi pekerjaan) sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya; dan masing-masing akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Lihat pula karangan 'Abd al-Rahman al-Maalikiy, *al-Siyaasat al-Iqtishadiyyah al-Mitsla*, 1963, tanpa penerbit, h. 21-22.

⁶⁰*Ibid.* h. 42.

⁶¹*Ibid.* h. 43.

⁶²*Ibid.*

bahwa hukum evolusi sosial sudah cukup untuk menghancurkan sistem ekonomi yang ada. Sedangkan Sosialis Negara, berpendapat bahwa undang-undang-lah sebagai cara untuk menerapkan pemikiran-pemikiran dan sistem sosialisme. Mereka berasumsi bahwa dengan adanya undang-undang itu maka akan terjaga kemashlahatan umum serta perbaikan kondisi pekerja.⁶³

Mereka juga berbeda pendapat dalam melihat institusi yang akan mengendalikan proyek-proyek dalam sistem sosialisme. Sosialis Kapitalis berpendapat bahwa pengendalian proyek -- produksi dan distribusi-- diserahkan kepada negara. Sedangkan aliran Naqabiyyah berpendapat bahwa pengendalian distribusi diserahkan kepada sekelompok pekerja yang terorganisasi di bawah komando pemimpin-pemimpin mereka.⁶⁴

Teori Mark yang sangat berpengaruh adalah teori mengenai nilai (value). Walaupun sebenarnya teori tentang nilai yang dikemukakan Mark diambil dari teori tentang nilai ini dari pemikir Kapitalis, tapi kecerdikan Mark adalah, ia menggunakan teori nilai tersebut untuk menyerang konsep ekonomi kapitalis. Adam Smith --bapak ekonomi Kapitalis- mendefinisikan nilai sebagai berikut, "*Nilai barang apapun tergantung pada tenaga yang dicurahkan untuk menghasilkan barang tersebut. Karena itu, nilai barang yang proses produksinya menghabiskan waktu dua jam tentu melebihi nilai barang yang produksinya membutuhkan waktu satu jam*".⁶⁵ Kemudian Ricardo, mencoba menjelaskan teori usaha tersebut, dan ia mendefinisikan nilai sebagai berikut, "*Yang menentukan nilai barang tersebut bukan semata-mata kadar usaha yang secara langsung dikorbankan untuk menghasilkannya, tapi juga pada usaha yang telah dikorbankan sebelumnya untuk menghasilkan alat-alat dan perlengkapan-perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi.*"⁶⁶

Karl Marx mengambil teori nilai Ricardo tersebut untuk menyerang pemilikan individu sistem Kapitalis. Marx menyatakan, bahwa sumber satu-satunya nilai adalah usaha yang dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Kapitalis telah membeli tenaga kerja para buruh dengan harga sebatas kebutuhan hidup pekerja, sedangkan pekerja mencurahkan tenaganya untuk memproduksi barang, yang harga barang tersebut nilainya jauh lebih tinggi dari upah yang diberikan kepada mereka. Karl Marx menyebut hal ini sebagai surplus labour and value (nilai lebih tenaga kerja). Yakni perbedaan antara upah riil yang diterima buruh, dengan apa yang diproduksi oleh buruh. Marx menilai bahwa selama ini hak pekerja (nilai lebih tadi), telah dirampas oleh pemilik modal atau pemilik kerjaan dengan bersembunyi dibalik apa yang dinamakan pendapatan, laba, manfaat modal (capital utility), yang sebelumnya tidak pernah ada.

Sedangkan untuk menerapkan pemikiran-pemikirannya Marx menyakini bahwa dengan materialisme sejarah (historical materialism). Dalam Manifesto Partai Komunis, Karl Marx dan Friedrich Engels (1848) menyebutkan dalam bab I. Kaum Borjuis dan Kaum Proletar, bahwa:

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Lihat, Nabhani, *Nidzam al-Iqtishaadiy fi al-Islaam*, ed. iv, 1990, Daar al-Ummah, Beirut; h. 44.

⁶⁶ *Ibid.*

"sejarah dari semua masyarakat⁶⁷ yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang-merdeka dan budak, patrisir dan plebejer,⁶⁸ tuan bangsawan dan hamba, tukang-ahli⁶⁹ dan tukang pembantu, pendeknya: penindas dan yang tertindas, senantiasa ada dalam pertentangan satu dengan yang lain, melakukan perjuangan yang tiada putus-putusnya, kadang-kadang dengan tersembunyi, kadang-kadang dengan terang-terangan, suatu perjuangan yang setiap kali berakhiran dengan penyusunan-kembali masyarakat umumnya atau dengan sama-sama binasanya kelas-kelas yang bermusuhan.... Masyarakat borjuis modern yang timbul dari runtuhan masyarakat feudal tidak menghilangkan pertentangan-pertentangan kelas. Ia hanya menciptakan kelas-kelas baru, syarat-syarat penindasan baru, bentuk-bentuk perjuangan baru sebagai ganti yang lampau."⁷⁰ Marx berasumsi bahwa perubahan masyarakat kapitalis menuju masyarakat sosialis (komunis), akan berjalan mengikuti hukum dialektika -- (materialisme historis), tanpa ada intervensi dari manapun.

Dengan demikian dalam merubah masyarakat, Marx mempercayakan penuh kepada materialisme historis. Secara ringkas pandangan Marx dapat diringkas sebagai berikut: "Sistem masyarakat apapun, sebenarnya akibat dari suatu kondisi ekonomi, yang satu-satunya sebab perubahan-perubahan tersebut dikembalikan pada satu hal, yakni perjuangan kelas (classes struggle). Dimana tujuan dari classes struggle ini adalah memperbaiki kondisi ekonomi. Sejarah telah menunjukkan bahwa kelas yang tertindas, atau kelas yang lebih dominan jumlahnya akan terus berjuang, yang di akhirnya akan dimenangkan oleh kelompok tertindas, dan dominan tersebut. Inilah yang disebut dengan teori evolusi sosial.⁷¹

Pada masa dahulu, perjuangan kelas dilakukan oleh kelas budak terhadap kelas orang-orang yang merdeka. Kemudian antara kelas orang terpandang dengan kelas orang awam. Setelah itu kelas terpandang dengan petani, kemudian antara kelas pemimpin formal dengan kelas pemimpin non-formal dalam masyarakat majemuk. Tahap akhir dari perjuangan menunjukkan bahwa kelas yang dominan jumlahnya (yakni kaum tertindas) akan menang. Tapi kelompok yang menang ini pada perkembangannya akan menjadi penindas-penindas baru. Pergerakan ini mengikuti hukum dialektika, dimana negasi lama akan menjadi sinthesa baru, kemudian dicarikan antithesanya, kemudian dari proses dialektika muncul negasi baru, akibat kontradiksi intern.⁷²

Tapi sejak revolusi Perancis, perjuangan kelas telah berubah. Yakni perjuangan antara kelas menengah (borjuis) dengan kelas para pekerja (proletar), dimana yang menang akan menjadi

⁶⁷Yang dimaksud dengan borjuasi adalah klas kaum Kapitalis modern, pemilik-pemilik alat-alat produksi sosial dan pemakai-pemakai kerja upahan. Dengan proletariat dimaksudkan klas kaum pekerja-upahan modern yang, karena tidak mempunyai alat-alat produksi sendiri, terpaksa menjual tenaga kerja mereka untuk dapat hidup (Keterangan Engels pada edisi Inggris tahun 1888).

⁶⁸Kaum patrisir dan plebejer adalah klas-klas di Roma Kuno. Kaum patrisir adalah klas pemilik tanah besar yang berkuasa, yang menguasai tanah dan negara. Kaum plebeyer (dari perkataan pleb -rakjat jelata) adalah klas wargakota yang merdeka, tapi tidak mempunyai hak penuh sebagai wargakota. Untuk mengetahui klas-klas di Roma hingga soal yang sekecil-kecilnya lihatlah buku Engels, Asal-usul Keluarga, Hak Milik Perseorangan dan Negara.

⁶⁹Tukang-ahli, yaitu seorang anggota penuh dari suatu gilde, seorang ahli di dalam gilde, tapi bukan kepala gilde.(Keterangan Engels pada edisi Inggris tahun 1888).

⁷⁰Karl Marx dan Friedrich Engels (1848), *Manifesto Partai Komunis*, Cetakan Ketiga Yayasan Pembaruan, Jakarta 1959.

⁷¹Lihat Nabhani,*Nidzam al-Iqtishaadiy fi al-Islaam*, h.45. Lihat pula Karl Marx dan Friederich Engels, *Manifesto Partai Komunis*, cet.iii, Yayasan Pembaruan, Jakarya, 1959.

⁷²Untuk lebih jelasnya mengenai hukum evolusi sosial, baca *Manifesto Partai Komunis*, Karl Marx dan F. Engels, pada bab I. *Kaum Borjuis dan Kaum Proletar*, dan lihat pula bab II; *Kaum Proletar dengan Kaum Komunis*

pengendali atas proyek-proyek perekonomian dan menjadi pemilik modal atau menjadi kelompok konservatif. Dengan cara inilah kelas proletar bangkit melawan kelas borjuis, dimana menurut Marx, konfrontasi ini dikembalikan pada satu sebab, yakni faktor ekonomi⁷³.

Pertentangan kelas ini terjadi, karena kaedah kepemilikan tidak berjalan sebagaimana kaedah produksi. Pada suatu saat produksi tidak mungkin dilakukan dengan sendirian --ekonomi kuno--, tapi kini produksi telah melibatkan individu-individu lain (bersifat kolektif). Masing-masing individu bekerja sama untuk melakukan proses produksi. Tapi pada saat yang sama, sistem kepemilikan tidak berubah (-- menjadi kolektif), tapi tetap menjadi kepemilikan individu. Sistem kepemilikan tidak berubah seiring dengan perubahan sistem produksi. Dimana hal ini mengakibatkan kaum proletar tidak mungkin memiliki modal, walaupun kenyataannya ia ikut berproduksi. Ia tetap berada di bawah kelas kapitalis, padahal kaum kapitalis tidak pernah ikut secara langsung proses produksi. Tapi kaum kapitalis terus menghisap kerja kaum proletar, dengan memberikan upah sebatas keperluan pokok pekerja.⁷⁴

Lahirlah kemudian teori surplus labour and value (nilai lebih tenaga kerja). Marx mendasari teori ini pada suatu kenyataan, yakni perbedaan antara upah riil buruh dengan nilai usaha para pekerja. Nilai usaha para pekerja ini telah dirampok oleh kaum kapitalis, padahal menurut Marx, nilai usaha para pekerja yang menghasilkan laba produksi, adalah hak para pekerja bukan hak kapitalis.⁷⁵ Karena itu, Marx berasumsi bahwa perjuangan kelas akan terus terjadi sampai sistem kepemilikan sama dengan sistem produksi. Atau dengan sederhana, sampai kepemilikan menjadi kepemilikan kolektif. Perjuangan kelas ini akan dimenangkan oleh kaum proletar, dengan mengikuti hukum evolusi sosial.⁷⁶

Dialektika masyarakat akan terus berjadi, dimana sistem lama akan dihancurkan, kemudian dibangun di atas puing-puing itu sistem baru. Sistem yang ada akan mengalami kehancuran menurut hukum dialektika sejarah (interpretasi sejarah terhadap ekonomi). Bila kelas borjuis pernah menang melawan kelas kaum terpandang, dan menjadi pengendali kegiatan perekonomian (termasuk didalamnya modal). Tapi pada fase berikutnya dominasi borjuis akan direbut oleh kaum proletar.

Berakhirnya kelas borjuis oleh kelas pekerja (proletar), dijelaskan dengan teori akumulasi modal (law of capital accumulation).⁷⁷ Teori secara ringkas menjelaskan berkurangnya jumlah pemilik modal, dan terus bertambahnya jumlah pekerja. Ini bisa terjadi ketika terjadi apa yang

⁷³ *Ibid.* Lihat pula Nabhani, *al-Nidzam al-Iqtishaadiy fi al-Islam*; ed.iv, 1990, Daar al-Ummah, Beirut, h. 45-57.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Lihat, Teori Marx, tentang Materialisme Historis, yang menjelaskan perubahan-perubahan sistem masyarakat akibat ekonomi. Pada dialektika sejarah Marx menempatkan keadaan ekonomi sebagai "materi". Sehingga dialektika sejarah, sering juga disebut dengan "*analisa ekonomis terhadap sejarah*" (*economic interpretation of history*). Dengan hukum dialektis, masyarakat berkembang dari satu kondisi, yakni masyarakat feodal, menuju masyarakat dengan kondisi yang lebih maju (masyarakat kapitalis kemudian menuju sosialis).

⁷⁷ Sebenarnya teori *Law of Capital Accumulation*, yang diajarkan oleh Marx diadopsi dari konsep ekonomi Kapitalis. Yakni, terjadinya penggabungan pergerakan modal dan kerja dari berbagai industri atau pabrik. Proses ini terjadi ketika ada sebagian pabrik yang sudah besar (kapitalis raksasa), ada sebagian pabrik yang masih kecil. Fenomena tidak berimbang ini --karena ada persaingan bebas-- akan mengakibatkan jumlah pabrik yang sama produksinya akan berkurang karena telah terjadi sentralisasi produksi. Katakanlah bila dalam satu daerah dahulu terdapat 10 pabrik, maka pabrik itu bisa tinggal menjadi 4 atau lima saja, sementara pabrik yang lain bisa dimusnahkan. Dengan teori ini Marx ingin mengungkapkan bahwa krisis akibat persaingan bebas, akan menghasilkan jumlah kapitalis akan berkurang, sedangkan jumlah pekerja akan berkurang. Lebih lanjut, lihat penjelasan mengenai *Law of Capital Accumulation*.

disebut dengan akumulasi modal pada sejumlah pabrik. Ketika itu terjadi persaingan bebas, yang berakibat produk yang dihasilkan akan berlimpah, sehingga kuantitas produk akan melampaui jumlah konsumen dari kalangan pekerja --disebabkan upah mereka yang tidak mencukupi. Peristiwa inilah oleh Marx diklaim sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini akan berdampak habisnya kekayaan pada sebagian pemilik modal. Akibatnya pemilik modal yang kehabisan modalnya akan masuk ke dalam kelas pekerja. Krisis inilah sebagai pintu gerbang menuju masyarakat sosialis. Masyarakat sosialis adalah rantai terakhir dari proses dialektika sejarah (evolusi sejarah).

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah, Muhammad Husein, Dr., *Dirasatu fi Al-fikriy al-Islamiy*, Beirut: Darul Bayaariq, 1991.
Abu Ubaid, al-Imaam, al-Haafidz, *Kitaab al-Amwaal*, ttp., tpn., tth.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, juz I,
Al-Ghazali, *Ihyaa’ ‘Uluum al-Diin*, Juz.II,
Al-Maalikiy, 'Abd al-Rahman, Dr., *Al-Siyaasat al-Iqtishaadiyyah al-Mitsla*, ttp., tpn., 1963.
Al-Nabhani, Qadli, *Nidzam al-Iqtishadiy fi al-Islam (Sistem Ekonomi Dalam Islam)*, ed. IV, Beirut:Daar al-Ummah, 1990.
- Al-Zain, Samih ‘Athif, *Al Islam Khuthutun 'Aridhah: Al Iqtishad, Al Hukm, al-Ijtima'*, [Islam; Garis-garis Besar Tentang: Ekonomi, Pemerintahan, dan Masyarakat], ttp., tpn., tth.
- Boeke, J.H., *Economics and Economics Policy of Dual Societies*, Harlem: H.D. Tjeeuk Willink, 1951.
- Boulding, Kenneth E., *Beyond Economics, Essay on Society, Religion and Ethics*, Ann Arbor, The University of Michigan, 1970.
- Frieden, Jeffry A. & Lake, David A., ed.; *International Political Economy Perspectives on Global Power and Wealth*;New York: ST. Martin's, 1991.
- Heilbroner, Robert L., *The Worldly Philosophers*, New York: A.Touchstone Book, 1970.
- Iqbal, Muhammad, Dr., *Islam Sebagai Suatu Cita Moral dan Politik*, Bandung: Pt. Ma'arif, 1981.
- Isaak, Robert A., *International Political Economy*, ttp., tpn., tth.
- Jones, R.J. Barry, *Respectives on Political Economy*, London, Francis Pinter,1983.
- Journal of Research in Islamic Economics*, vol.1 noi.2 , 1984.
- Keynes, J.M., *The General of The Employment Interest and Money*; Tokyo: Maruzen Co. 1957.
- Lutz, Mark A. & Lux, Kenneth; *The Chlange of Humanistic Economics*; California: The Benjamin Cummings Publishing, Co.Inc, Menlo Park, 1979.
- Marsh, Alfred, *Principles of Economics*; New York: The MacMillan Company, 1948.
- Marx, Karl & Engels, Friedrich (1848), *Manifesto Partai Komunis*, Cet. III, Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1959.
- Mill, John Stuart, *Principles of Political Economy, With Some of Their Application to Social Philosophy*; Fairfield, August M. Kelley Publishers, 1977.
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila; Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3S, cet.I, 1987.
- Myrdal; *Against the Stream; Critical Essay on Economics*; New York: Vintage Books, 1975.
- Myrdall, Gunnar, *The Political Element in the Development of Economics Theory*; A. Clarton Book; New York: Simon and Schuster, 1969.

- Nienhaus, Volker, "Islamic Economics; Policy Between Pragmatism and Utopia, dalam Economics, vol.25, West Germany: Institute for Scientific Cooperation, 1982.
- Rahardjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1990.
- Robbins, Lord, "Essay on The Nature and Significance of Economics Science", London: MacMilland & Co. LTD, 1962.
- Smith, Adam, *The Wealth of Nation*, New York: The Modern Library, 1937.
- Strange, Susan, "Structure, Values, and Risk in the Study of the International Political Economy", dalam R.J. Barry Jones, *Respectives on Political Economy*, London, Francis Pinter, 1983.
- Weber, Max, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, terjemahan Talcott Parsons, London: Unwin University Book, 1974.
- Weisband, Edward, ed., *Poverty Amidst Plenty: World Political Economy and Distributive Justice*, Boulder, CO. Westview, 1989.